

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, maka Penulis menyimpulkan :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuat Laporan Kinerja tepat pada waktu yang sudah ditentukan dalam Permenpan RB No. 53 Tahun 2014, yaitu 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sedangkan DPMPTSP sudah menyapaikan Laporan Kinerja tahun 2020 pada tanggal 29 Januari 2021, yaitu satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Dari segi format, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP Tahun 2020 masih belum sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014, hal ini disebabkan bahwa Laporan Kinerja yang dibuat masih mengacu pada Permen PAN RB No. 29 Tahun 2010 yang sudah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan adanya Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014.

3. Kinerja DPMPTSP tahun 2020 masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan alat ukur yang digunakan itu indeks kinerja utama (IKU) yang terdiri dari Realisasi nilai investasi penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta sebesar 86,36%, Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 101,68%, Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online sebesar 100% dan Persentase kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 96,19% dengan predikat sangat baik.

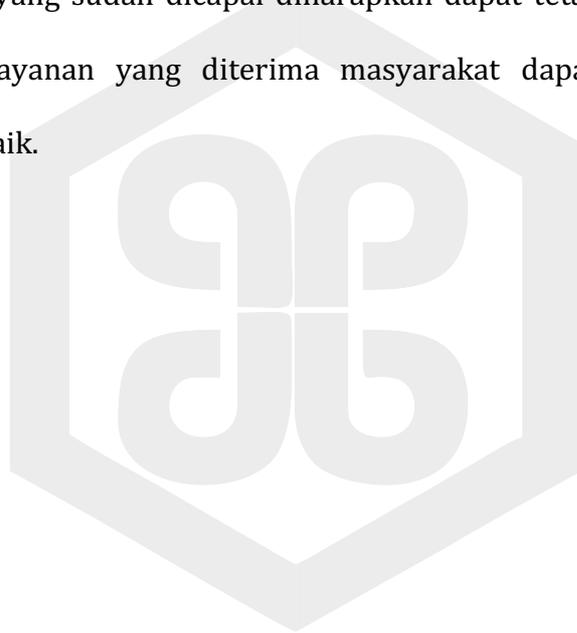
B. Saran

Walaupun DPMPTSP mencapai kinerja yang sangat baik pada tahun 2020, bukan berarti bahwa DPMPTSP sudah sempurna dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ada beberapa saran dari penulis agar ke depan Laporan Kinerja DPMPTSP dapat lebih baik dari tahun 2020 antara lain :

1. Dalam menunjang pelayanan online yang diselenggarakan oleh DPMPTSP supaya meningkatkan penyediaan sarana internet, seperti jaringan yang tidak gampang terganggu. Memastikan vendor jaringan internet agar mempunyai komitmen dalam menyediakan jaringan yang kuat.
2. Untuk membuat laporan kinerja yang sesuai dengan format peraturan yang ada, diharapkan untuk selalu memahami perubahan-

perubahan aturan yang ada dan menyesuaikan segala bentuk laporan dengan peraturan yang masih berlaku.

3. Kinerja yang sudah dicapai diharapkan dapat tetap dipertahankan, agar pekayanan yang diterima masyarakat dapat terus berjalan dengan baik.



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohim Tauleka (2019). *Metodelogi Penelitian Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Surabaya. Airlangga University Press.
- BPKP (2011). *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Bogor. Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
- Dwi Lestari, Risha. 2019. *Analisis Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sietem Pelaporan, Pengawasan Fungsional, dan Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik. : Study Empiris pada OPD di Kabupaten Temanggung*. Skripsi tidak diterbitkan. Kota Magelang. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Harahap, Rudy (2013). *Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik Konsep, Praktik, Studi Kasus dan Topik Lanjutan*. Jakarta. Pusat Informasi Pengawasan BPKP.
- Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. (2006). *Model Penyelarasan Desain Pengukuran Kinerja individu dan Organisasi*. Jakarta. ©Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- LAN dan BPKP, 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara.
- Lukito, P. K. (2014). *Membumikan transparansi dan akuntabilitas Kinerja Sektor Publik : Tantangan berdemokrasi ke depan*. Jakarta, PT. Grasindo.
- Mangunsong, J. A. 2013. *Peranan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Instansi Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi tidak diterbitkan. Medan. Program Studi Akuntansi Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Mukarom, Zaenal dan Laksana, M. W (2016). *Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance*. Bandung. CV. Pustaka Setia.
- Moleong, J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Ngatmo (2015). *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Semarang. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

Putu Agung, Anak Agung (2012). *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Malang. Universitas Brawijaya Press.

Putri Perwirasari, F.B. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip)*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Semarang. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Rusdiana. A and Nasihudin (2018). *Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian*. Bandung. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung.

Salim and Syahrudin (2012). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Citapusaka Media.

Sandu Siyoto and Ali Sodik, M (2015). *Dasar Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta. Literasi Media Publishing.

Soleh, Chabib ang Suropto. (2011). *Menilai Kinerja Pemerintahan daerah. Model-model Penilaian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan, Akhir Tahun dan Laporan Pelaksanaan APBD*. Bandung. Fokusmedia.

Sundari, Sri (2019). *Manajemen Kinerja*. Bogor. Universitas Pertahanan.

Tarjo (2019). *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta. Deepublish.

Vigih Hery Kristanto (2018). *Metodelogi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. Yogyakarta. Deepublish.

Wahyu Ristina (2018). *Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Kelautan Dan Perikanan (Studi Kasus Pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Bone)*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Makasar. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Makassar.

Wulansuci, P. S. (2017). *Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Studi Kasus di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Yogyakarta. Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang *Sisten Akunatabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)*.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang *Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.*

_____, Nomor 14 Tahun 2017 tentang *Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik*

Pereaturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang *Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*

_____, Nomor 18 Tahun 2020 tentang *Penilaian Kinerja.*

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/1x/6/8/2003 tentang *Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

LAMPIRAN

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020
2. Daftar Pertanyaan Penelitian
3. Lembar Persetujuan Penelitian Lapangan
4. Surat Penelitian Lapangan
5. Daftar Riwayat Hidup Penulis

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A



2020

ZV

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERITAH
TAHUN 2020**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

URUS IZIN SENDIRI ITU MUDAH

SETIA #MelayaniJakarta



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C 22

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta telah dapat diselesaikan.

LKIP Tahun 2020 DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada Tahun 2020, sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

LKIP Tahun 2020 DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta memuat informasi tentang penyelenggaraan pelayanan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Akhir kata, disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Tahun 2020 DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, 29 Januari 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta



Benni Agusandra
NIP. 196908081997031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPMPSTSP PROVINSI DKI JAKARTA	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA	5
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	6
A. RENCANA STRATEGIS	6
1. VISI	6
2. MISI	6
3. TUJUAN DAN SASARAN	7
4. INDIKATOR KINERJA	8
B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	11
1. TARGET DAN REALISASI KINERJA	12
2. REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DIBANDINGKAN CAPAIAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	13
3. REALISASI KINERJA DAN TARGET TAHUN 2020	13
4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN, TANTANGAN DAN PENINGKATAN KINERJA	14
5. ANALISIS ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA	26
6. ANALISIS PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENYAMPAIAN PERNYATAAN KINERJA	28
B. REALISASI ANGGARAN	33
C. PENGHARGAAN	36
BAB IV PENUTUP	37

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Terdapat dua indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 yang telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 dan Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 serta program prioritas Pemerintah provinsi DKI Jakarta lainnya. Dua indikator kunci tersebut adalah realisasi investasi dan indeks kepuasan masyarakat. Adapun pencapaian indikator tersebut secara keseluruhan mencapai 94% atau masuk dalam kategori berhasil.

Jumlah alokasi anggaran yang dialokasikan untuk mencapai target tersebut sebesar Rp.529.794.412.438,- dengan penyerapan sebesar Rp. 449.344.352.307,- atau 84,81%. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.392.329.355.222,- dengan penyerapan sebesar Rp. 317.113.681.039,- atau 80,83% dan Belanja Langsung sebesar Rp.137.465.057.216,- dengan penyerapan sebesar Rp. 132.230.671.268,- atau 96,19%.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Upaya reformasi birokrasi dan regulasi yang mengatur tentang kegiatan usaha telah dianggap sebagai dasar tata kelola pemerintahan yang baik dan merupakan suatu kondisi yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya reformasi birokrasi tersebut dilakukan melalui reformasi birokrasi perizinan dan non perizinan. Upaya yang dilakukan dalam reformasi birokrasi tersebut adalah mengurangi dan mempersingkat jumlah maupun waktu administrasi pengurusan berbagai prosedur yang harus dilalui oleh pelaku usaha.

Untuk mewujudkan reformasi birokrasi dalam perizinan dan non perizinan maka dibentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta serta Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan capaian keberhasilan dan kegagalan capaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2020 dan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. TUJUAN

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Menjadikan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien, ekonomis dan responsif terhadap aspirasi masyarakat;
- c. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020; dan
- d. Hasil evaluasi akan menjadi acuan perbaikan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.

C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP PROVINSI DKI JAKARTA

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja DPMPTSP, DPMPTSP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. DPMPTSP mempunyai tugas pelayanan dan penandatanganan izin dan non izin yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan perencanaan, pengembangan, pelayanan pengaduan dan komunikasi masyarakat, pengelolaan sistem teknologi informatika dan atas penyelenggaraan PMPTSP.

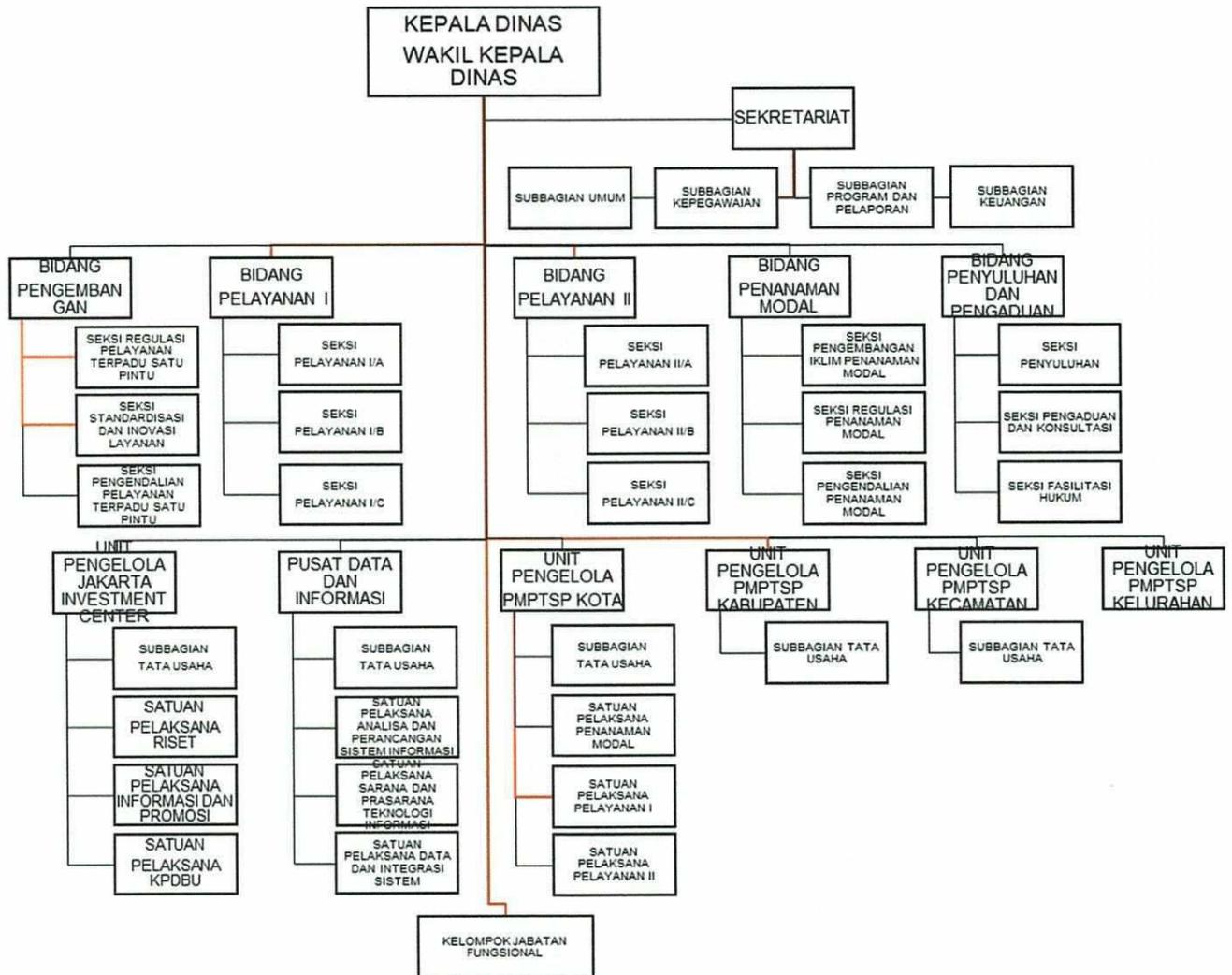
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;
- d. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;
- e. penyelenggaraan penanaman modal;
- f. penyelenggaraan pelayanan perizinan/non perizinan;

- g. penandatanganan dan penyerahan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- h. penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- i. pengelolaan arsip dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- j. pengelolaan data dan sistem teknologi informasi Dinas;
- k. pelayanan penyuluhan, penyelesaian pengaduan/keluhan, masyarakat serta fasilitasi hukum atas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- l. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- m. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- n. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/ atau Sekretaris Daerah.

Struktur organisasi dan tata kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah sebagai berikut.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Sumber : Pergub Provinsi DKI Jakarta No 160 Tahun 2019

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah PNS pada DPMPTSP terhitung sampai dengan 31 Desember 2020 berjumlah 1.246 orang. Jumlah PNS tersebut masih jauh dari kata cukup untuk jumlah pegawai dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan. Oleh karena itu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan pegawai antara lain dengan penambahan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan meliputi Juru Ukur ISI, Penunjang Juru Ukur, Petugas Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), Petugas Informasi dan Konsultasi (Call Center), Petugas Customer Relation, Arsitek Perizinan, Inspektur Bangunan, Petugas Site Office Manager, Petugas Community Manager, Pekerja Harian Lepas (PHL) dan Caraka dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Non PNS Menurut Pendidikan Di Lingkungan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta

Jabatan	Jumlah
Juru Ukur	117
Penunjang Juru Ukur	137
Pengolah Data	96
Petugas Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB)	200
Petugas Informasi dan Konsultasi (Call Center)	28
Petugas Customer Relation	300
Arsitek Perizinan	16
Inspektur Bangunan	14
Petugas Site Office Manager	1
Petugas Community Manager	1
Pekerja Harian Lepas (PHL)	380
Caraka	55
Total	1.345

Sumber: Subbag Kepegawaian DPMPTSP

Secara keseluruhan jumlah sumber daya manusia PNS dan Non PNS di lingkungan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta berjumlah 2.591 orang.



"Pemrov. DKI Jakarta berkomitmen untuk terus bisa amanah, bekerja dengan sepenuh hati sehingga bisa tuntas dalam melayani semua kebutuhan Dasar dan Hak Sipil dari Warga yang ada di Jakarta. Mari kita bersama wujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, yang Prima. Perlu mengurus izin? Tidak perlu minta bantuan pihak ketiga, bisa urus sendiri. Di Jakarta Urus Izin Sendiri itu Mudah, pastikan Anda mengurus perizinan sendiri dan Inshaallah Anda akan merasakan kemudahannya"

Anies Rasyid Baswedan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta



BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis DPMPTSP tahun 2017-2022 di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak di capai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), pada hakekatnya didalam Renstra merupakan pernyataan komitmen jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja beserta cara pencapaiannya. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan DPMPTSP melalui perencanaan yang efektif dan terarah serta pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan

1. VISI

Visi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta adalah

“Solusi Investasi dan Perizinan di Jakarta”

2. MISI

Untuk menjabarkan visi tersebut, maka misi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta adalah:

- 1) Meningkatkan nilai investasi melalui promosi, penyempurnaan peraturan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan melalui penciptaan inovasi layanan berbasis sistem teknologi informasi;
- 3) Mengelola pengaduan masyarakat dengan berbasis *quick response*;
- 4) Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur DPMPTSP sesuai kompetensi;
- 5) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan handal.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2020 adalah :

**Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Periode Tahun 2020
 DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran	Keterangan
1.	Meningkatkan investasi di DKI Jakarta	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Realisasi investasi (Triliun rupiah)	110	Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (akan ada rencana perubahan target di RPJMD menjadi 75 T)
2	Meningkatkan Kualitas Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan melalui penyenggaraan layanan perizinan dan non perizinan secara online	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5	Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
3	Meningkatkan Pelayanan Perijinan dan non Perijinan yang diselenggarakan secara online	Meningkatnya Pelayanan Perijinan dan non Perijinan yang diselenggarakan secara online	1. Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	100%	Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
			2. Indeks Kepuasan Layanan Kantor	4	Berdasarkan Renstra DPMPTSP
			3. Indeks Kepuasan Kendaraan Dinas Operasional	4	Berdasarkan Renstra DPMPTSP

Sumber: Renstra DPMPTSP 2017-2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Definisi operasional dari indikator dalam tujuan dan sasaran DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta adalah:

1) Realisasi Investasi

Realisasi investasi adalah Jumlah nilai penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang diterbitkan oleh BKPM.

2) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

3) Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara Online

Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online adalah jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan yang sudah diselenggarakan secara online dibandingkan dengan seluruh jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan.

4) Indeks Kepuasan Layanan Kantor

Indeks kepuasan pelayanan kantor berdasarkan realisasi pelaksanaan program pada monev. Indeks 1 = 0-25%, Indeks 2 = >25%-50%, Indeks 3 = >50%-75%, Indeks 4 = >75%-100%.

5) Indeks Kepuasan Kendaraan Dinas Operasional

Indeks kepuasan pelayanan KDO berdasarkan realisasi pelaksanaan program pada monev. Indeks 1 = 0-25%, Indeks 2 = >25%-50%, Indeks 3 = >50%-75%, Indeks 4 = >75%-100%.

4. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja

suatu kegiatan. Indikator kinerja DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta ditampilkan berikut ini :

Tabel 2.2 Matriks Indikator Kinerja DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan RPJMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1.	Realisasi Investasi	Rp 55 T	Rp 93,10 T	Rp 100,20 T	Rp 107,8 T	Rp 115,90 T	Rp 124,50 T	Rp 541,50 T
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	80,00	83,00	86,00	88,00	88,50	88,50
3.	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	80,29%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Indeks Kepuasan Layanan Kantor	-	4	4	4	4	4	4
5.	Indeks Kepuasan Kendaraan Dinas Operasional	-	4	4	4	4	4	4

Sumber: RPJMD Tahun 2017-2022

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta disusun berdasarkan target kinerja tahun kedua dari RPJMD Provinsi DKI Jakarta, yang diselaraskan dengan Renstra DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta

yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

Dalam penetapan kinerja tersebut Kepala DPMPTSP dan Wakil Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta berjanji akan mewujudkan target kinerja berupa :

Tabel 2.4 Matriks Sasaran Strategis, Indikator Kinerja serta Target DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020
1	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Realisasi nilai investasi penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta.	110 Triliun
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan melalui penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan secara online	Indeks kepuasan masyarakat	88,5
3	Meningkatnya Pelayanan Perijinan dan non Perijinan yang diselenggarakan secara online	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	100%

Sumber : Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dalam rangka mewujudkan target tersebut DPMPTSP menargetkan penyerapan anggaran sebesar:

Tabel 2.5 Target Penyerapan Anggaran DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan Penanaman Modal	Rp 3.172.290.450	APBD
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 115.542.755.267	APBD
3	Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal	Rp 17.353.513.099	APBD

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

4	Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Penanaman Modal	Rp	1.396.498.400	APBD
	TOTAL	Rp	137.465.057.216	APBD

Sumber : DPA DPMPTSP 2020 (diolah)



S.E.T.I.A
SOLUSI, EMPATI, TEGAS, INOVASI, ANDAL

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100	:	Sangat Berhasil
70 s/d <85	:	Berhasil
55 s/d < 70	:	Cukup Berhasil
0 s/d < 55	:	Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. TARGET DAN REALISASI KINERJA

Sampai dengan Tahun 2020, realisasi kinerja DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Perkin	Realisasi	Capaian		
				Persen	Ordinal	Predikat
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Realisasi Nilai Investasi	110 Triliun	95 Triliun	86,36	86	Berhasil
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan melalui penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan secara online	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5	89,99	101,68	100	Sangat Berhasil
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan melalui penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan secara online	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	100	100	100	100	Sangat Berhasil
Rata-rata capaian kinerja				96,01%	95	Berhasil

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja DPMPSTSP bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal kedua target indikator kinerja memperoleh capaian berhasil dengan rata-rata nilai capaian kinerja DPMPSTSP sebesar 95% dapat dikategorikan berhasil.

2. REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DIBANDINGKAN CAPAIAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

Jumlah realisasi mengalami kenaikan dari tahun 2017 dari Rp.108,6 Triliun menjadi Rp.114,2 Triliun pada Tahun 2018 atau mengalami kenaikan sebesar 5,1% begitu pula pada tahun berikutnya terjadi kenaikan dalam jumlah realisasi investasi dari Rp 114,2 Triliun tahun 2018 menjadi Rp. 123,9 Triliun pada tahun 2019 atau mengalami kenaikan sebesar 8,5%. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan dari Rp. 123,9 Triliun menjadi Rp. 95 Triliun pada Tahun 2020 atau mengalami penurunan sebesar 23,3%. Untuk indikator tingkat kepuasan masyarakat pada tahun 2017 blm menggunakan ukuran indeks kepuasan masyarakat, Pada tahun selanjutnya indeks kepuasan masyarakat mengalami penurunan kinerja dari 85,55 pada tahun 2018 menjadi 83,03 pada tahun 2019 atau menurun sebesar 3%. Namun mengalami peningkatan pada tahun 2019 dari 83,03 menjadi 89,99 pada tahun 2020 atau naik sebesar 8,4%.

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
1	Realisasi nilai investasi penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta	108,6 Triliun	114,2 Triliun	123,9 Triliun	95 Triliun
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	85,55	83,03	89,99
3	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	99%	100%	100%	100%

3. REALISASI KINERJA DAN TARGET TAHUN 2020

Indikator kinerja jumlah realisasi investasi penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta ditargetkan pada tahun 2020 dapat mencapai Rp 110 Triliun dan pada tahun 2020 telah tercapai Rp 95 Triliun atau sebesar 86,36%. Indikator kinerja tingkat kepuasan masyarakat

ditargetkan pada tahun 2020 adalah 88,5 dan sampai tahun 2020 telah tercapai 89,99 atau sebesar 101,68%.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 Dengan Target Tahunan Provinsi DKI Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Realisasi nilai investasi penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta	110 Triliun	95 Triliun	86,36%
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan melalui penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan secara online	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5	89,99	101,68%
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan melalui penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan secara online	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	100%	100%	100%

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN, TANTANGAN DAN PENINGKATAN KINERJA

a. Jumlah realisasi investasi penanaman modal di provinsi DKI Jakarta

Jumlah realisasi investasi penanaman modal di provinsi DKI Jakarta menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di provinsi DKI Jakarta. Capaian kinerja jumlah realisasi investasi pada tahun 2020 yakni sebesar Rp. 95 Triliun dari target sebesar 110 Triliun atau tercapai sebesar 86,36% dan masuk dalam kategori berhasil. Hal ini disebabkan membaiknya iklim penanaman modal di Provinsi DKI

Jakarta sehingga memberikan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Jakarta. Perbaikan infrastruktur dan banyaknya program pemerintah di bidang pembangunan juga turut meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Jakarta. Dan jika dibandingkan dengan target tahunan maka capaian indikator ini telah tercapai 88%.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja organisasi adalah :

- Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan Penanaman Modal dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang antara lain digunakan untuk harmonisasi peraturan, pelaksanaan promosi dan pengendalian penanaman modal.
- Dikembangkannya sistem yang memudahkan pemohon dalam mengajukan izin dan non izin secara online,
- Diselenggarakannya Mal Pelayanan Publik merupakan pelayanan terpadu dan terintegrasi antara pelayanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu gedung pelayanan,
- Perbaikan dalam kebijakan *Ease Of Doing Business* (EODB) yang mempengaruhi investor dalam menginvestasikan dananya di Jakarta. Dalam rangka mendukung peningkatan peringkat EODB atau Kemudahan Berusaha di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, maka dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka mendukung Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha / *Ease Of Doing Business* (EODB) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, yang mana di dalamnya terdapat keputusan bahwa meniadakan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dalam persyaratan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP DKI Jakarta dan selain itu untuk Penerbitan SIUP dan TDP dilakukan secara online dengan waktu penyelesaian 0,5 hari setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.

- Dikembangkannya *Jakarta Investment Center* (JIC) untuk memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan segala informasi tentang investasi di Jakarta.
- Dilakukannya pengendalian pelaporan LKPM sehingga dapat diketahui besarnya investasi yang telah ditanamkan oleh para investor di DKI Jakarta.
- Ditingkatkannya UMKM dengan melakukan kemudahan melalui relaksasi pemberian IUMK.
- Dikembangkannya pengintegrasian Sistem JakEvo-AJIB untuk mengatasi perizinan yang tidak dapat dilakukan secara online 100% karena beberapa hal yang harus tetap dijalani secara manual.

Tantangan dalam mencapai target kinerja organisasi adalah :

- Adanya pandemi *COVID-19* yang belum berakhir.
- Harmonisasi peraturan pemerintah pusat dan daerah yang belum tercapai.
- Masyarakat dan pelaku usaha belum sepenuhnya menerima informasi perubahan kebijakan yang telah dilakukan Pemda DKI Jakarta terkait *ease of doing business* (EODB).
- Masih terbatasnya informasi proyek-proyek investasi yang akan dipromosikan.

Tindak lanjut tantangan :

- Melakukan pengkajian dan penelaahan atas adanya kebijakan yang baru agar dapat diimplementasikan.
- Menyederhanakan regulasi investasi dan atau penanaman modal serta melakukan sosialisasi regulasi terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.
- Meningkatkan aktivitas promosi melalui Branding (*awareness campaign*, penguatan citra investasi DKI) dan *Bussines Forum*.
- Mengoptimalkan fungsi JIC dalam rangka memperoleh informasi terkait proyek-proyek investasi yang ada di Provinsi DKI Jakarta.
- Harmonisasi regulasi Pusat dan Daerah.

- Penyusunan kebijakan dan disinsentif.
- Pengembangan kebijakan iklim penanaman modal sebagai agenda pemulihan ekonomi.
- Optimalisasi pengawasan dan fasilitasi penanaman modal.
- *Self Awareness* terhadap kebijakan EODB.
- Optimalisasi promosi investasi mewujudkan Jakarta sebagai destinasi investasi.
- Fasilitasi KPBU sebagai salah satu agenda *Creative Financing*

b. Indeks Tingkat kepuasan masyarakat

Indeks tingkat kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator kinerja DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta karena merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja, dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Indeks tingkat kepuasan masyarakat diukur dengan cara melakukan Survey Kepuasan Masyarakat. Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta pada pusat-pusat layanan baik dari tingkat Dinas, Kep. Seribu, Kotamadya, Kecamatan dan Kelurahan. Total unit layanan yang dievaluasi adalah sebanyak 310 layanan, yang terdiri dari 1 Dinas, 5 unit kota/ 1 Kab, 42 layanan kecamatan dan 261 unit kelurahan. Survey dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian wawancara langsung dengan masyarakat yang telah mendapatkan layanan secara paripurna dengan menggunakan kuesioner terstruktur (*Structured Questionnaire*).

Untuk perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan pedoman yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 197 Tahun 2016 dan sekarang di sesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14

Tahun 2017, dimana terdapat 9 pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat, dengan unsur-unsur pelayanan yang ditanyakan meliputi:

1. Kemudahan Persyaratan Pelayanan,
2. Kemudahan Prosedur Pelayanan,
3. Ketepatan Waktu Penyelesaian,
4. Kesesuaian Biaya,
5. Kesesuaian Peraturan (Hasil Pelayanan dengan Ketentuan yang ditetapkan),
6. Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan,
7. Sikap SETIA
8. Kualitas sarana dan prasarana dan
9. Kecukupan / keefektifan sarana informasi/pengaduan

Berdasarkan jawaban yang diterima dari responden tersebut kemudian dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang pada masing-masing aspek layanan. Hasil perhitungan tersebut kemudian disesuaikan dengan Tabel Nilai persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan, sehingga bisa diketahui Mutu Pelayanan dan Kinerjanya.

Tabel 3.4 Nilai Persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,59	25 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,06	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,06 - 3,53	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,53 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Untuk mengetahui gambaran hasil penelitian maka perlu dilakukan analisa hasil survei dengan mengelompokkan kedalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu tingkat Kota/Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan kemudian untuk Analisa data Provinsi, ditambahkan

data Provinsi. Dengan demikian maka akan diketahui karakteristik masing-masing tingkatan, sehingga memudahkan para pengelola layanan mengetahui kekuatan dan kelemahan terhadap layanan yang diberikan kepada publik. Kemudian dari keempat tingkatan tersebut dihitung juga nilai IKM secara keseluruhan. Nilai IKM ini selanjutnya menjadi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Provinsi DKI.

Kemudian untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan DPMPSTP secara keseluruhan, maka dilakukan analisa *Top 2 Boxes*, yaitu menghitung jumlah responden yang menyatakan puas dan sangat puas pada pertanyaan "J: Secara keseluruhan, seberapa puas Anda dengan Layanan Terpadu Satu Pintu yang diberikan oleh DPMPSTP DKI?" Kemudian jumlah keduanya dibagi dengan jumlah responden secara total, sebagai berikut:

$$Top\ 2\ Boxes = \frac{\sum(Puas + Sangat\ Puas)}{Jumlah\ Responden}$$

Pembahasan hasil penelitian selanjutnya akan di kelompokkan dalam 4 (empat) bagian pembahasan, yaitu:

1. Tingkat Kotamadya,
2. Tingkat Kecamatan,
3. Tingkat Kelurahan,
4. Tingkat Provinsi dan
5. Secara Keseluruhan.

Capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2020 sebesar 89,99 dari target sebesar 88,5 atau tercapai sebesar 101,68% dan masuk dalam kategori sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maka terdapat kenaikan sebesar 8,4% yakni dari 83,03 pada tahun 2019 menjadi 89,99 pada tahun 2020. Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian indikator ini telah tercapai 101,68%.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja organisasi adalah :

- Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- Biro ORB dan Kominfo memberikan dukungan penuh kepada DPMPTSP terkait pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- Sarana Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sudah baik seperti kuesioner SKM sudah diintegrasikan dengan Sistem Jakevo, sehingga kuesioner secara otomatis muncul sebelum responden *mendownload* output perizinan/non perizinan.
- Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh Sumber Daya Manusia DPMPTSP untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
- Tersedianya sarana prasarana kantor dan pendukung teknis yang memadai dalam pelaksanaan layanan perizinan dan non perizinan.
- DPMPTSP berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui harmonisasi peraturan dan penyederhanaan persyaratan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- Keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai persyaratan, prosedur dan biaya dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diakses melalui portal pelayanan.jakarta.go.id
- Diselenggarakannya Mal Pelayanan Publik sebagai one-stop service 328 perizinan dan pelayanan terpadu kerjasama pelayanan pemerintah pusat dan daerah.
- Tersedianya pelayanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), yaitu layanan antar jemput berkas izin bagi pemohon yang tidak mempunyai waktu untuk datang langsung mengurus izin ke loket, semua jenis perizinan dan non perizinan dapat dilakukan melalui AJIB dengan syarat pemohon harus sebagai pimpinan/karyawan perusahaan tersebut dan bukan pihak ketiga atau calo, selain itu dikembangkan pelayanan AJIB dengan Mobile Service Unit (MSU)

sebanyak 3 unit yang dapat juga melayani perizinan dan non perizinan di lokasi tertentu. Jumlah jasa pengurusan melalui AJIB pada tahun 2020 secara keseluruhan 497.440 layanan.

- Tersedianya layanan Call Center DPMPTSP yang dapat diakses melalui sambungan telepon 021-1500164 untuk melayani informasi pengurusan layanan perizinan dan non perizinan, pengaduan masyarakat dan pemesanan layanan AJIB. Selama tahun 2020 Call Center DPMPTSP telah melayani sebanyak 137.513 layanan.
- Adanya pelayanan IMB 3.0 yakni pengurusan IMB dengan waktu 3 jam untuk luas tanah >200 m², dengan syarat ketentuan berlaku.
- Terobosan serta inovasi untuk kemudahan layanan perizinan dan non perizinan, antara lain :
 - a. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan mendukung Ketetapan Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH) maka telah dilakukan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah atas permohonan perizinan dan/atau non perizinan dengan melakukan pengecekan pada basis data yang dimiliki Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) melalui integrasi data dengan sistem yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - b. Sesuai dengan INKADIS No.21 Tahun 2018 tentang penggunaan Sistem Pelaporan Perizinan dan Non Perizinan pada aplikasi pelaporan. Pelaporan melalui sistem web internal meliputi pelaporan PTSP Manual, PTSP Online, Dukcapil/PMI, legalisir/pencabutan/mutasi dan konsultasi.
 - c. Untuk memperbaiki sistem pelaporan bulanan dari masing-masing service point, maka telah dibuatkan sebuah sistem pada *website internalpelayanan.jakarta.go.id* yang mana dari masing-masing service point melakukan rekap pelaporan pada sistem tersebut paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.

- d. Adanya Aplikasi e- KRK untuk pengurusan Ketetapan Rencana Kota (KRK) secara real time online dengan penjadwalan survey online dan penyatuan database terintegrasi di Sistem Jakarta Satu.
- e. Pencantuman QR Code pada papan IMB yang terintegrasi dengan sistem JakEvo, yang memberikan informasi lengkap soal status bangunan tersebut agar mempermudah dinas terkait dalam melakukan pengawasan terhadap izin IMB dengan melakukan scanning terhadap QR Code, inovasi ini dilakukan penerapan pada UP PTSP Kecamatan Jatinegara.
- f. Layanan Platinum IMB online untuk rumah tinggal membantu warga yang gagap teknologi dalam pengurusan IMB yang dilakukan dengan jempot bola dengan membawa mesin EDC sehingga pemohon bisa langsung membayar retribusi sesuai aturan. Layanan ini diterapkan pada UP PTSP Kecamatan Kalideres.
- g. Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Perizinan atau Masdarin adalah kelompok sadar perizinan di masyarakat yang memahami dan mengerti tentang pelayanan perizinan maupun yang sudah pernah melakukan permohonan perizinan online ataupun yang nantinya akan mendapatkan pengetahuan serta bimbingan dari petugas guna menyebarkan informasi pelayanan perizinan mulai dari tingkat RT/RW sampai kecamatan sehingga tidak ada lagi perizinan yang ditolak atau dikembalikan permohonannya.
- h. Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Fasilitas Kesehatan dengan e-survei (Si Unik) di UP PTSP Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan. Output dari sistem ini adalah Berita Acara Survey Secara Elektronik (e-survei) untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan sarana kesehatan yang sebelumnya memerlukan waktu lebih dari 14 hari kerja menjadi hanya 1 hari kerja.
- i. Pembuatan Aplikasi S-Mobile sebagai percepatan proses peninjauan lapangan pada permohonan SIP Dokter Umum

- Praktik Perorangan di UP PTSP Kecamatan Makasar. S-Mobile merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan web mobile untuk mempermudah petugas dalam proses peninjauan lapangan dan pembuatan BAPL dengan standar lengkap. Mempercepat proses penerbitan izin SIP Dokter Praktik Perorangan dari proses 7 hari kerja menjadi 3 hari kerja.
- j. Percepatan penyampaian laporan output perizinan bidang kesehatan berbasis elektronik (Silabik) di UP PTSP Kecamatan Taman Sari. Sistem pelaporan kesehatan berbasis elektronik mempercepat Dinas Teknis terkait (Suku Dinas Kesehatan) untuk mendapatkan data perizinan bidang kesehatan yang diterbitkan oleh DPMPTSP sehingga memudahkan untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Pengawasan Pengendalian (BINWASDAL)
 - k. Pengintegrasian izin terpadu pelayanan perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata khususnya bagi peserta PKT (Pelatihan Kewirausahaan Terpadu) yang sudah dilatih SKPD terkait dan sudah mendapatkan izin UKM agar mendapatkan izin lanjutan TDUP agar pelaku usaha rintisan PKT ini bisa cepat naik kelas sehingga menjadi solusi untuk membuka lapangan pekerjaan bagi jutaan warga DKI Jakarta.
 - l. Kemudahan mengajukan IUMK melalui jakevo.jakarta.go.id
 - m. Dalam rangka mendorong aktivitas perekonomian dan pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta akibat wabah *Covid-19* maka dilakukan Percepatan dan Relaksasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan sikap responsif, proaktif dengan tetap mempertimbangkan aspek kesehatan, keamanan dan keselamatan.
 - n. Penyelenggaraan Pelayanan Izin Penggunaan Tanah Makam secara elektronik melalui web jakevo.jakarta.go.id dalam rangka efektivitas pelayanan Izin Penggunaan Tanah Makam.
 - o. Dalam rangka pelaksanaan Pergub 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta maka diterbitkan Tata Cara Penerbitan

- Surat Izin Keluar/Masuk dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*.
- p. Percepatan pelayanan Izin Pembuangan Air Limbah dilaksanakan dengan menyederhanakan prosedur dan persyaratan.
 - q. Dalam rangka mendorong aktivitas perekonomian pada masa pandemi *Covid-19* maka perlu dilakukan Pelaksanaan Relaksasi Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).
 - r. Penyelenggaraan pelayanan perizinan Izin Usaha Toko Swalayan dengan penyesuaian SLF dalam rangka pemulihan ekonomi akibat *Covid-19*.
 - s. Dalam rangka mendukung ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan untuk menanggulangi dampak status tanggap darurat bencana wabah *Covid-19* di Provinsi DKI Jakarta maka dilakukan Perpanjangan Masa Berlaku Dokumen Izin Tertentu di Bidang Kesehatan terkait penyebaran *Covid-19*.
 - t. Ujicoba Pelayanan Perizinan Bangunan Terintegrasi pada Bangunan Rumah Tinggal Sub Standar Eksisting melalui Jakevo 4.0
 - u. Pembuatan kanal Sistem Informasi Kotak Aspirasi (SIKOPI) pada web internalpelayanan.jakarta.go.id sebagai sarana komunikasi pengumpulan fakta-fakta lapangan yang diharapkan dapat mendekatkan kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dan implementasi pelaksanaan layanan tersebut di lapangan. Selain itu, melalui hal tersebut diharapkan juga agar ditemukannya permasalahan-pemmasalahan baru yang tersembunyi dari perspektif manajemen atau pejabat yang berwenang, sehingga dapat menghasilkan capaian yang maksimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat berdasarkan *evidence based*.

Tantangan dalam mencapai target kinerja organisasi adalah :

- Adanya pandemi *Covid-19* yang belum berakhir.

- Adanya perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan dari pemerintah pusat yang membutuhkan waktu penyesuaian.
- Masih adanya anggapan bahwa layanan perizinan dan non perizinan sulit dan rumit.
- Masih terdapat rekomendasi dari SKPD teknis terhadap perizinan dan non perizinan yang melebihi batas waktu
- Kebutuhan SDM Teknis masih ada kekurangan.

Tindak lanjut tantangan :

- Sosialisasi peraturan, kebijakan dan SOP terkait diagendakan secara terjadwal serta melibatkan stakeholder terkait.
- Pembuatan program untuk memberikan informasi, pengarahan, dan penyajian fakta berbasis data bahwa DPMPTSP merupakan tempat pengurusan izin cepat, mudah, terjangkau, tidak ada pungli.
- Perlu dikembangkan aplikasi pemberian rekomendasi secara online (e-rekomtek)
- Dilakukan perekrutan Tenaga Ahli bidang teknis yang memenuhi standar.

c. Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online

Layanan perizinan dan non perizinan online dikembangkan untuk memastikan masyarakat memperoleh jaminan pelayanan sesuai dengan SOP, yakni jaminan prosedur, syarat, waktu dan biaya. Selain itu dengan adanya layanan online diharapkan mampu mengurangi jumlah calo yang merugikan pemohon.

Capaian persentase layanan perizinan dan non perizinan secara online tahun 2020 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2020 maupun target jangka menengah maka indikator ini telah tercapai 100%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator ini adalah:

- Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan pengembangan layanan perizinan dan non perizinan secara online.
- Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh SDM DPMPTSP untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
- Dukungan dari SKPD teknis terkait yakni Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Prov. DKI Jakarta dalam rangka pengembangan sistem *online* berupa pemberian rekomendasi.
- Tersedianya SOP yang lengkap terkait perizinan dan non perizinan sebagai dasar pembuatan bisnis proses pengembangan sistem *online*.

Tantangan pencapaian indikator

- Perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan menjadi tantangan tersendiri bagi DPMPTSP untuk terus mengembangkan sistem online layanan perizinan dan perizinan yang lebih cepat dan akomodatif terhadap kebutuhan pemohon.

Tindakanlanjutan Tantangan

- Bidang pengembangan serta Bidang Penanaman Modal akan memberikan updating informasi mengenai perubahan SOP sehingga dapat langsung diakomodir dalam sistem online.

5. ANALISIS ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

a. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Jumlah PNS pada DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta terhitung sampai dengan 31 Desember 2018 berjumlah 1.246 pegawai dan jumlah pegawai non PNS sebanyak 1.345 sehingga jumlah total pegawai DPMPTSP sebanyak 2.591 pegawai, sedangkan menurut analisa beban kerja kebutuhan pegawai dibutuhkan PNS sebanyak

3.047 pegawai menurut Analisa jabatan(Anjab) atau Analisa Beban Kerja (ABK).

Tabel 3.5 Perbandingan Jumlah Pegawai dengan Capaian Kinerja

Jumlah Pegawai	Jumlah Anjab/ABK	Persen	Capaian Kinerja
2.591	3.047	85,03 %	94%

Melihat tabel tersebut diatas bahwa meskipun jumlah pegawai masih lebih kecil dari kebutuhan ANJAB/ABK yakni sebesar 85,03%, namun capaian kinerja secara keseluruhan rata-rata tercapai 94%. Hal ini menunjukkan bahwa DPMPSTSP dapat mengoptimalkan sumber daya manusia di Lingkungan DPMPSTSP.

Berdasarkan analisis sumber daya diatas, terutama dari segi sumber daya manusianya, maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan SDM masih diperlukan untuk mendorong optimalisasi target kinerja. Dan kebutuhan tenaga PJLP sebagai pendukung capaian kinerja DPMPSTSP sangat dibutuhkan.

b. Analisa Sumber Daya Anggaran

Target belanja DPMPSTSP pada tahun Rp.529.794.412.438 dan realisasi sebesar Rp. 449.344.352.307 atau sebesar 84,81 %.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	%
Realisasi nilai investasi penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta	86,36%	72,13%	119,7%
Indeks Kepuasan Masyarakat	101,68%	97,84%	103,9%
Rata-rata	94,02%	84,98%	111,8%

Dibandingkan dengan kinerja yang dicapai pada tahun 2020 realisasi anggaran sebesar 84,98% dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar 94,02% menunjukkan adanya efektifitas penggunaan dana.

Berdasarkan analisis sumber daya diatas, terutama dari segi penyerapan anggarannya, maka dapat disimpulkan bahwa tahun 2020 DPMPTSP masih membutuhkan tambahan alokasi anggaran yang tidak sedikit. Kebutuhan anggaran tersebut diperlukan untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka mencapai target dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2017-2022 dan untuk mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas

6. ANALISIS PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENYAMPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja DPMPTSP sebanyak 4 program dengan 41 kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program tersebut adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Penanaman Modal

Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.172.290.450,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.288.424.636,- Hasil kegiatan dari program ini antara lain:

- Diadakannya JIC Talks secara virtual dengan tema “ DKI Jakarta Menuju Ketahanan Pangan” Pada tanggal 24 September 2020.
- Diadakannya JIC Talks secara virtual dengan tema :” Investment Research Insight” yang menjelaskan lebih mendalam mengenai riset pemasaran pada tanggal 27 Oktober 2020 dan 2 November 2020
- Pengadaan Webinar ‘penanganan Covid-19 di DKI Jakarta pada tanggal 24 November 2020 dengan Tema ‘Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Sosial dan Ekonomi’ yang disiarkan

langsung melalui Zoom Meetings dan Channel Youtube Layanan Jakarta.

- Manerima kegiatan misi penanaman modal, yaitu:
 1. Kunjungan dari DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat
 2. Kunjungan dari DPMPTSP Provinsi Jambi.
 3. Kunjungan dari Delegasi Australian Embassy
 4. Kunjungan dari PT. Garuda Visi Nusantara dan Beihang UAS Technology Co.Ltd
 5. Fasilitas Xtramile Solutions sebagai follow up Jakarta Business Forum Sydney 2019
 6. Fasilitas Osaka Gas Project sebagai follow up Indonesia Japan Business Forum 2019
 7. Fasilitas Volocopter GmbH untuk proyek Urban Air Mobility
 8. Fasilitas PT. Seribu Pesona Indonesia untuk proyek pengembangan Kawasan pariwisata dan bisnis di Kepulauan Seribu
 9. Fasilitas Revitalisasi Taman Margasatwa Ragunan
 10. Fasilitas Macquarie Capital dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya untuk proyek Intermediate Treatment Facility
 11. Fasilitas Proyek KPDBU JSS Zona 8
 12. Fasilitas Proyek KPDBU LRT Jakarta
 13. Fasilitas Rencana Proyek KPDBU SPAM Karian
 14. Fasilitas Rencana Proyek KPDBU SPAM Jatiluhur 1 sistem hilir
 15. Fasilitas KPDBU Rusunawa Daan Mogot
 16. Fasilitas Rencana Proyek KPDBU Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika
- Jumlah peraturan pendukung perizinan dan non perizinan yang telah disusun 160 Keputusan Kepala Dinas, 3 Instruksi Kepala Dinas, 6 Pengumuman dan 41 Surat Edaran Kepala Dinas.
- Jumlah LKPM yang direview 12.197 perusahaan.

b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 115.542.755.267,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 113.047.351.889,- Hasil kegiatan dari program ini antara lain:

- Meraih Sertifikat ISO 9001:2015 pada Bidang Pelayanan I yaitu dalam Sistem Manajemen Mutu.
- Diselenggarakannya webinar Pelatihan Kewirausahaan 2020 UMKM Maju Berdaya di Era Pandemi COVID-19 dengan tema 'Cara Mudah Mendapatkan Izin Usaha' pada tanggal 17 November 2020.
- Relaksasi pemberian Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
- Telah diterbitkannya 111.142 izin usaha mikro dan kecil (IUMK)
- Direkrutnya 300 Customer Relation Officer (CRO) sebagai front office DPMPTSP.
- Direkrutnya 200 pegawai Antar Jemput Ijin Bermotor (AJIB) yang melayani sebanyak 497.440 layanan.
- Direkrutnya 28 orang pegawai Call Center dan melayani sebanyak 137.513 layanan.
- Direkrutnya 117 orang Juru Ukur, 137 orang Penunjang Juru Ukur dan 96 orang Pengolah Data, 16 Arsitek Perizinan dan 14 Inspektur Bangunan.
- Bidang Penyuluhan dan Pengaduan pada Tahun 2020 memberikan pelayanan informasi masyarakat sebanyak 308.058 layanan, terdiri dari loket konsultasi/penyuluhan 13.890 layanan, melalui surat dan media sosial sebanyak 7.369 layanan, email sebanyak 2.018 layanan, Call Center sebanyak 137.513 layanan dan melalui kunjungan *best practice* (baik secara langsung maupun melalui bantuan teknologi informasi) diikuti 649 peserta.
- Perhitungan AVE (Advertising Value Equivalency) yaitu efektifitas pencapaian pelaksanaan fungsi kehumasan (Public Relation) yang diukur dengan memberi perkiraan nilai moneter sebuah kampanye public relation melalui interaksi media komunikasi baik offline maupun online dengan mengonversikan terpaan pesan

komunikasi ke dalam nilai moneter pemasangan iklan. Berdasarkan perhitungan total AVE DPMPTSP sepanjang tahun 2020 sebesar 23,8 Miliar.

- Pelaksanaan kegiatan komunikasi masyarakat terpadu dilakukan dengan daring imbas dari pandemi *Covid-19* sehingga kegiatan yang dilakukan melalui ruang publik ditiadakan sementara waktu. Namun, jumlah publikasi media televisi meningkat sebesar 27%. DPMPTSP diberitakan 1106 kali di berbagai media baik TV, Radio, media cetak maupun online, media sosial sebanyak 9.080.833 impression. Telah dilaksanakan kegiatan komunikasi masyarakat terpadu bekerjasama dengan Kementerian Kominfo melalui program Layanan Jakarta ON TV telah tayang sebanyak 23 episode setiap hari Selasa pukul 18.30 WIB dan siaran ulang pada pukul 07.00 WIB di channel GPRTV (C Band Satelit Telkom 4 Freq 3766 pMHz) atau melalui Live Streaming di website GPRTV.ID. Video yang diproduksi sebanyak 203 video motion grafis. Desain grafis yang diproduksi sebanyak 103 design. Panduan atau pedoman terkait pelaksanaan komunikasi masyarakat terpadu sebanyak 9 panduan/pedoman dengan topik diantaranya panduan SIKM, panduan penyelenggaraan event hybrid (seremonial virtual), petunjuk teknis untuk kelengkapan ISO 9001:2015, 2 Strategi komunikasi untuk program unggulan DPMPTSP di Tahun 2020, 2 protokol krisis, kalender komunikasi setiap triwulan, dan laporan pelaksanaannya setiap bulan sesuai Instruksi Sekretaris Daerah No.76 Tahun 2020 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kinerja Daerah Provinsi DKI Jakarta. Media produksi melibatkan 43 publik figur yang menyatakan dukungan/testimoni mengenai pelayanan publik yang prima di Jakarta.
- Publikasi berita positif DPMPTSP dengan rasio berita positif sebesar 8,9.
- Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat telah dilaksanakan dengan hasil indeks kepuasan masyarakat sebesar 89,99.

- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi layanan dengan jumlah yang sudah di monev sebanyak 269 service point.
- Tersedianya sistem informasi pendukung layanan investasi serta perizinan dan non perizinan yakni Jakevo, Jakarta Virtual Consultan for Bussines Prosses (JVC4b) dengan OSS (*Online Single Submission*), Jakarta Investment Center.
- Jumlah pelaksanaan sidang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebanyak 29 kali.
- Bidang Aktivitas Usaha telah berhasil mendapatkan sertifikat The International Organization For Standardization (ISO).SNI ISO 9001: 2015

c. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal

Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 17.353.513.099,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.051.172.296,- Hasil kegiatan dari program ini antara lain:

- Beroperasinya sarana dan prasana kantor sesuai sasaran fungsionalnya.
- Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor pendukung layanan perizinan dan non perizinan antara lain alat tulis kantor, alat rumah tangga kantor, kelengkapan komputer seperti (flash disk, mouse, keyboard, hard disk, speaker dll) dan alat kerja lainnya untuk unit layanan di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten dan Provinsi.

d. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Penanaman Modal

Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.372.592.440,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.846.183.888,- Hasil kegiatan dari program yakni terpelihara dan beroperasinya Kendaraan Dinas Operasional sebanyak 336 motor dan 28 unit mobil.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2020 DPMPSTP mengalokasikan anggaran sebesar Rp.529.794.412.438,- Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 392.329.355.222,- dengan penyerapan sebesar Rp. 317.113.681.039 atau 80,83% dan Belanja Langsung sebesar Rp.137.465.057.216,- dengan penyerapan sebesar Rp. 132.230.671.268,- atau 96,19 %, yang dijabarkan ke dalam 4 Program dan 36 Kegiatan. Dengan penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
BELANJA TIDAK LANGSUNG		392.329.355.222	317.113.681.039	80,83%
	Belanja Pegawai	392.329.355.222	317.113.681.039	80,83%
BELANJA LANGSUNG		137.465.057.216	132.230.671.268	96,19%
Program Peningkatan Penanaman Modal				
1	Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	71.940.000	71.940.000	100%
2	Pelaksanaan Penyusunan Regulasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.096.227.330	1.083.886.000	98,87%
3	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	21.142.180	20.800.000	98,38%
4	Persiapan dan Penyiapan Proyek Infrastruktur Strategis Daerah Yang Akan Dikerjasamakan Dengan Badan Usaha	498.400.000	220.410.000	44,22%
5	Penyelenggaraan Jakarta Investment Center	909.080.940	323.488.636	35,58%
6	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta	575.500.000	567.900.000	98,67%

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
1	Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	757.187.704	543.300.000	71,75%
2	Penelitian dan Uji Fisik Terhadap Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	12.666.080.246	12.169.272.400	96,08%
3	Pengelolaan Call Center	6.105.218.852	6.079.887.777	99,59%
4	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan (AJIB)	19.224.433.635	19.074.407.636	99,22%
5	Penyediaan Jasa Petugas Customer Relation Officer	27.962.812.561	27.707.897.293	99,09%
6	Penyediaan Jasa dan Peralatan Pendukung Penelitian Teknis	34.248.981.811	33.529.988.069	97,90%
7	Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	302.817.700	224.770.000	74,23%
8	Pengelolaan Pengaduan/Keluhan Atas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	638.800.000	570.600.000	93,35%
9	Penyediaan Jaringan Internet Pendukung Untuk Peningkatan Pelayanan Publik	4.365.689.864	4.220.707.300	96,68%
10	Pelaksanaan Komunikasi Masyarakat Secara Terpadu	2.629.125.544	2.376.979.640	90,41%
11	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	453.500.000	389.900.000	87,96%
12	Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pelayanan Publik	6.188.107.350	6.156.393.464	99,49%
Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal				
1	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	84.420.088	78.689.050	93,21%
2	Penyediaan alat tulis kantor	850.309.000	760.584.000	89,45%
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	63.910.500	57.403.500	89,82%

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
4	Penyediaan jasa administrasi surat menyurat/caraka	3.232.253.421	3.204.731.242	99,15%
5	Penyediaan makanan dan minuman	110.935.000	79.405.100	71,58%
6	Penyediaan sewa mesin foto copy	1.620.000.000	1.281.561.600	69,47%
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.623.091.528	1.481.830.000	91,30%
8	Penyediaan Jasa Telepon,Air, Listrik dan Internet	2.062.428.226	1.853.667.270	89,88%
9	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Keamanan Kantor	1.983.929.750	1.857.647.730	93,63%
10	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Kebersihan Kantor	1.951.095.538	1.921.450.724	98,48%
11	Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Lift	636.436.400	598.917.000	94,10%
12	Penyediaan Jasa Pembuangan Sampah	24.000.000	24.000.000	100%
13	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	25.314.300	23.705.154	93,64%
14	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan AC ME dan Genset Kantor	907.131.825	732.605.993	80,76%
15	Pemeliharaan Gedung Kantor	121.384.533	66.371.890	54,68%
16	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	2.056.872.990	2.036.299.473	99,00%
Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Penanaman Modal				
1	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	1.065.669.400	500.158.127	46,93%
2	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	76.252.700	75.580.900	99,30%
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus	254.576.300	254.393.700	99,93%
	TOTAL	529.794.412.438	449.344.352.307	84,81 %

Sumber: sistem money bappeda

Jika dibandingkan dengan tahun 2019 penyerapan secara total anggaran tahun 2020 menunjukkan penurunan dikarenakan kondisi ekonomi global akibat pandemi COVID-19, yakni menurun dari 91,72% menjadi 84,81%. Jika melihat kinerja penyerapan Belanja Langsung maka kinerja penyerapannya mengalami peningkatan, yakni dari 83,71% menjadi 96,19%, peningkatan ini dikarenakan adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan dan jajaran SDM di Dinas PM dan PTSP untuk terus meningkatkan kinerjanya serta adanya monev anggaran yang dilaksanakan secara rutin dan intensif untuk mendorong peningkatan realisasi dan adanya upaya antisipasi terhadap penyerapan anggaran yang mengalami hambatan. Sedangkan untuk kinerja penyerapan anggaran Belanja Tidak Langsung terdapat penurunan, yakni dari 95,49% menjadi 80,83%, hal ini disebabkan karena terdapat refocusing anggaran belanja pegawai akibat pandemi covid-19.

Tabel.3.8 Tabel Perbandingan Anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2020

Tahun	Anggaran			Penyerapan		
	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total
2019	543.259.791.000	256.085.712.571	799.345.503.571	95,49%	83,71%	91,72%
2020	392.329.355.222	137.465.057.216	529.794.412.438	96,19%	80,83%	84,81%

Sumber: sistem monev bappeda

C. PENGHARGAAN

Berikut disampaikan penghargaan yang diterima DPMPTSP tahun 2020:

1. Penghargaan Platinum Awards (Juara Umum) PRIA 2020 Kategori Pemerintah Provinsi
2. Pemenang PRIA 2020 Kategori Pemerintah Provinsi Terpopuler di Media
3. Best Presenter PRIA 2020 Kategori Pemerintah Provinsi- Rinaldi S.I Kom, M.Si- Kepala Seksi Penyuluhan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
4. Departemen PR- Kinerja Bidang Penyuluhan dan Pengaduan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
5. Media Sosial DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta @layanankarta
6. Video Profil DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta berjudul Jakarta Investment Center

7. Pra Krisis DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta
8. Program Government PR – DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta, Urus Izin Sendiri Itu Mudah
9. Program Digital PR-DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta, Mini seri di- AJIBin Aja
10. Penghargaan Kategori “Pilar pemerintah sebagai perangkat daerah yang
11. memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah DKI Jakarta dari International Council For Small Business (ICSB) Indonesia.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Terdapat tiga indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 yang telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 serta program prioritas Pemerintah provinsi DKI Jakarta lainnya. Adapun pencapaian kedua indikator tersebut secara keseluruhan mencapai 94,02 % atau masuk dalam kategori berhasil. Upaya koordinasi akan terus ditingkatkan dengan *stakeholder* terkait secara lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai melibatkan segenap instansi daerah dan pusat dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berbasis kinerja dan berorientasi pada hasil, serta untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh pihak terkait dan dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan pengelolaan kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta yang pada akhirnya dapat mewujudkan Visi DPMPTSP untuk menjadi "Solusi Investasi dan Perizinan di Jakarta".

Lampiran

- **PERJANJIAN KINERJA DPMPTSP**
- **DOKUMENTASI PENGHARGAAN**
- **DOKUMENTASI LAYANAN MAL PELAYANAN PUBLIK**
- **DOKUMENTASI LAYANAN AJIB**
- **DOKUMENTASI LIPUTAN LAYANAN DPMPTSP**

PERJANJIAN KINERJA DPMTSP



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BENNI AGUSCANDRA

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

Jabatan : Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2020

PIHAK KEDUA,

Gubernur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

BENNI AGUSCANDRA
NIP 196908081997031004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Realisasi nilai investasi	110 Triliun Rupiah
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan melalui penyenggaraan layanan perizinan dan non perizinan secara online	Indeks tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PTSP	88.5
3	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan yang diselenggarakan secara online	Persentase layanan perizinan dan non perizinan secara online	100%
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Penanaman Modal	2.272.817.085	APBD Provinsi DKI Jakarta
2	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal	70.873.597.986	APBD Provinsi DKI Jakarta
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	126.412.372.242	APBD Provinsi DKI Jakarta
4	Program Peningkatan Penanaman Modal	7.718.737.692	APBD Provinsi DKI Jakarta

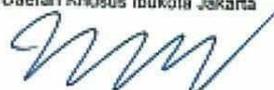
Jakarta, 31 Januari 2020

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Anies Rasyid Baswedan, Ph.D

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Benni Aguscandra
 NIP 195908081997031004



PR INDONESIA **PRIA** PUBLIC RELATIONS INDONESIA AWARDS 2020

PIAGAM PENGHARGAAN
Diberikan kepada

**Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta**

**PEMENANG
PR INDONESIA AWARDS 2020**

Kategori Terpopuler di Media
Sub Kategori Pemerintah Provinsi

Jakarta, 20 April 2020
PR INDONESIA

Asmono Wikan
Founder & CEO



PR INDONESIA **PRIA** PUBLIC RELATIONS INDONESIA AWARDS 2020

**SILVER WINNER
PR INDONESIA AWARDS 2020**

Kategori Pemerintah Provinsi
Sub Kategori Video Profil

Dinas PM dan PTSP
Provinsi DKI Jakarta
Jakarta Investment Centre

Jakarta, 20 April 2020
PR INDONESIA

Asmono Wikan
Founder & CEO





SILVER WINNER
PR INDONESIA AWARDS 2020

Kategori Pemerintah Provinsi
Sub Kategori Digital PR

Dinas PM dan PTSP
Provinsi DKI Jakarta
Mini Seri di-AJIBin Aja

Jakarta, 20 April 2020
PR INDONESIA



Asmono Wikan
Founder & CEO



PEMENANG PLATINUM
PR INDONESIA AWARDS 2020

Kategori Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Jakarta, 20 April 2020
PR INDONESIA



Asmono Wikan
Founder & CEO





SALAM SETIA

SELAMAT PAGI WARGA JAKARTA

Orang sukses mengawali paginya dengan senyuman, segala urusan akan dimudahkan. Yuk kita sambut hari ini dengan penuh semangat. Semangat mengurus izin dan non izin SENDIRI ya

SALAM SETIA #MELAYANIJAKARTA



#MELAYANIJAKARTA

☎ 1500164 🌐 pelayanan.jakarta.go.id 📺 [/PelayananJakarta](https://www.facebook.com/PelayananJakarta) 🐦 [@layananjakarta](https://twitter.com/layananjakarta) 📷 [@layananjakarta](https://www.instagram.com/layananjakarta) 📺 [/layananjakarta](https://www.youtube.com/channel/UC...)

SALAM SETIA

tv one

SERIBU

JOY KEMUNING #

22

2015

PENYAMPATAN INFORMASI

Relaksasi Perizinan

Jakarta

#MELAYANIJAKARTA

SALAM SETIA

"Duduk diam dirumah, izin usaha selesai. Makasih PTSP dan Jakpreneur!"



-Salmah Fitriyanti,
Pemilik Jajanan Kekoreaan



#MELAYANIJAKARTA

1500164 | pelayanan.jakarta.go.id | #MelayaniJakarta | @MelayaniJakarta

SALAM SETIA

5 Alasan Pentingnya Memiliki Izin Usaha

- Usaha yang memiliki izin, mendapatkan jaminan hukum dan perlindungan dari pemerintah apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.
- Usaha yang memiliki izin lengkap dan sah akan mendapatkan kemudahan dalam hal pembiayaan perbankan untuk perkembangan usaha.
- Usaha yang memiliki izin akan lebih mudah ikut serta dalam tender.
- Usaha lokal yang memiliki izin, memiliki kesempatan untuk memperluas usahanya ke tingkat internasional.
- Dengan memiliki izin usaha, maka kredibilitas usaha anda baik dan semakin mudah untuk mengikuti promosi melalui pameran yang diselenggarakan pemerintah.

#MELAYANIJAKARTA

SALAM SETIA

LANGKAH PENGAJUAN IZIN JAKEVO

JAM AKTIF
SENIN - JUMAT
08.00-15.00

Jakarta.jakarta.go.id

- Pencarian Izin**
 - 1. Menentukan lokasi
 - 2. Menentukan cara pengisian formulir
 - 3. Menentukan cara pengisian formulir
 - 4. Menentukan lokasi pengisian formulir
 - 5. Menentukan lokasi pengisian formulir
- Pengisian Formulir**
 - 1. Pengisian formulir
 - 2. Pengisian formulir
- Konfirmasi**
 - 1. Menentukan lokasi pengisian formulir
 - 2. Menentukan lokasi pengisian formulir
- 1. Menentukan lokasi pengisian formulir
 - 2. Menentukan lokasi pengisian formulir

1500164 | pelayanan.jakarta.go.id | #MelayaniJakarta | @MelayaniJakarta

#MELAYANIJAKARTA

SALAM SETIA

URUS IZIN DAN
NON IZIN ONLINE
MUDAH DAN
GAK RIBET

JAKEVO

AJIB
Ajar Sempul dan Bermula

URUS IZIN
SENDIRI
ITU
MUDAH

Download Jakevo mobile dan AJIB di :

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

#MELAYANIJAKARTA

☎ 1500164 🌐 pelayanan.jakarta.go.id 📺 /PelayananJakarta 🐦 @layananjakarta 📷 @layananjakarta 📺 /layananjakarta

SALAM SETIA

Hello Warga Jakarta

TANYA
PTSP
1500 164

#MELAYANIJAKARTA

☎ 1500164 🌐 pelayanan.jakarta.go.id 📺 /PelayananJakarta 🐦 @layananjakarta 📷 @layananjakarta 📺 /layananjakarta

SALAM SETIA

#MELAYANIJAKARTA

☎ 1500164 🌐 pelayanan.jakarta.go.id 📺 /PelayananJakarta 🐦 @layananjakarta 📷 @layananjakarta 📺 /layananjakarta

DOKUMENTASI LAYANAN MAL PELAYANAN PUBLIK

beritaPMPSTP

SALAM SETIA

Jawa Pos

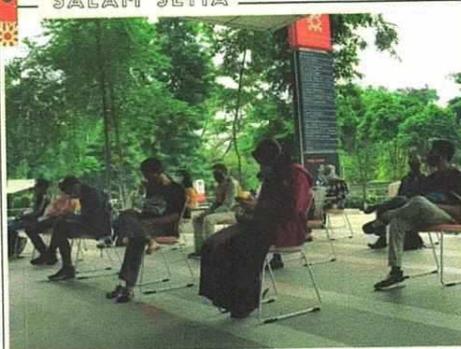


TAKT PROTOCOL. Pelayanan publik tetap dibuka meski dibuka di sejumlah tempat di DKI, termasuk di mal ini.

#HELAYANIJAKARTA Jakarta

1800164 @pelayanan.jakarta.go.id #pelayanan.jakarta @kayananjakarta @kayananjakarta @kayananjakarta

SALAM SETIA

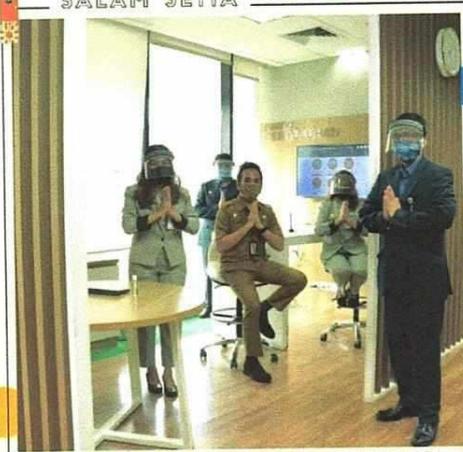


#JAGAJAKARTAUNTUKSEMUA
Terapkan protokol kesehatan dan pembatasan jarak antar manusia saat mengakses pelayanan publik

#HELAYANIJAKARTA Jakarta

1800164 pelayanan.jakarta.go.id #pelayanan.jakarta @kayananjakarta @kayananjakarta @kayananjakarta

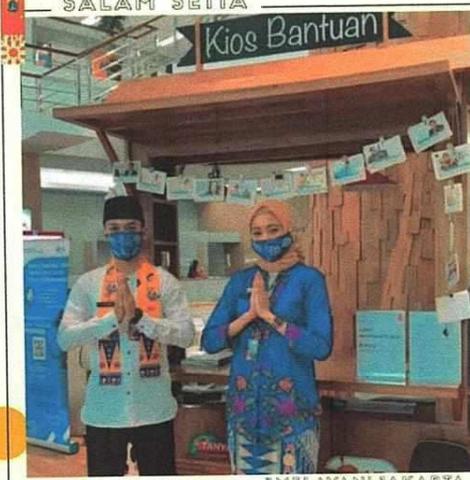
SALAM SETIA



#HELAYANIJAKARTA

1800164 pelayanan.jakarta.go.id #pelayanan.jakarta @kayananjakarta @kayananjakarta @kayananjakarta

SALAM SETIA



#HELAYANIJAKARTA

1800164 pelayanan.jakarta.go.id #pelayanan.jakarta @kayananjakarta @kayananjakarta @kayananjakarta

MAL PELAYANAN PUBLIK PROVINSI DKI JAKARTA

Perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan yang nyata bagi warga Indonesia. Layanan yang ada di Mal Pelayanan Publik selain layanan DPMPSTP Provinsi DKI Jakarta terdapat berbagai pelayanan yaitu: dijem pajak, dijem imigrasi, dijem AHU dijem bea dan cukai, BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, BPN, Ditjen Statistik (sudah pindah ke BPS)





DOKUMENTASI KUNJUNGAN DALAM RANGKA BEST PRACTICE LAYANAN DAN INOVASI DPMTSP

**KUNJUNGAN BKPSDM KAB. BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**
29 NOVEMBER 2018



Salam SEJIA #Melayarijakarta

1500144 | @melayarijakarta | #melayarijakarta

**KUNJUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA (BKN)**
4 DESEMBER 2018



Salam SEJIA #Melayarijakarta

1500144 | @melayarijakarta | #melayarijakarta

**KUNJUNGAN INSTITUT PEMERINTAH
DALAM NEGERI (IPDN)**
23 NOVEMBER 2018



Salam SEJIA #Melayarijakarta

1500144 | @melayarijakarta | #melayarijakarta

**KUNJUNGAN DPMTSP PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**
26 NOVEMBER 2018



Salam SEJIA #Melayarijakarta

1500144 | @melayarijakarta | #melayarijakarta

**KUNJUNGAN KEMENLU
REPUBLIK INDONESIA**
27 NOVEMBER 2018



Salam SEJIA #Melayarijakarta

1500144 | @melayarijakarta | #melayarijakarta

**KUNJUNGAN UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945**
22-11-2018

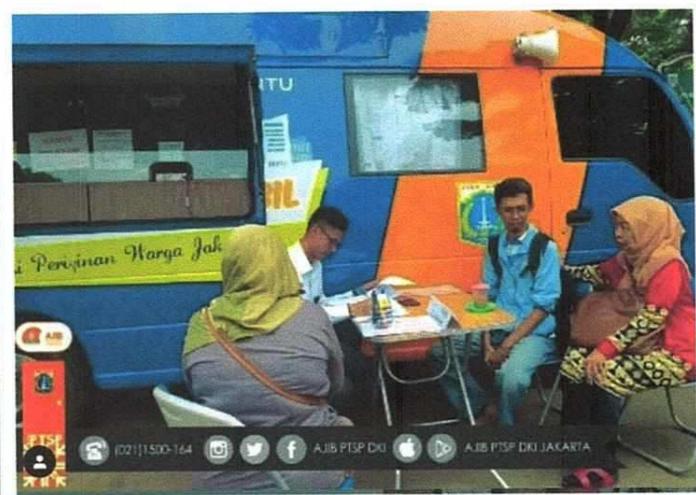


Salam SEJIA #Melayarijakarta

1500144 | @melayarijakarta | #melayarijakarta

DOKUMENTASI LAYANAN AJIB

Gak Ada Waktu
Urus Izin dan Non Izin?
Di AJIB-in AJA



SALAM SETIA



#MELAYANIJAKARTA

1500164 @pelayanan.jakarta.go.id #pelayananjakarta @layananjakarta

beritaPMPTSP

SALAM SETIA

#DiAJIBinAja, Urus Izin "On-line" Jadi Makin Seru

Siapa Persewaan Benda dan Pelayanan Terpadu. Lalu Pemas (PMPTSP) Provinsi DKI Jakarta membuat layanan ini semakin menarik. Dengan hadirnya layanan AJIB, upaya ini dinilai efektif untuk meningkatkan praktik perantara atau call center.

Persewaan Benda dan Pelayanan Terpadu (Pemas) Provinsi DKI Jakarta membuat layanan ini semakin menarik. Dengan hadirnya layanan AJIB, upaya ini dinilai efektif untuk meningkatkan praktik perantara atau call center.



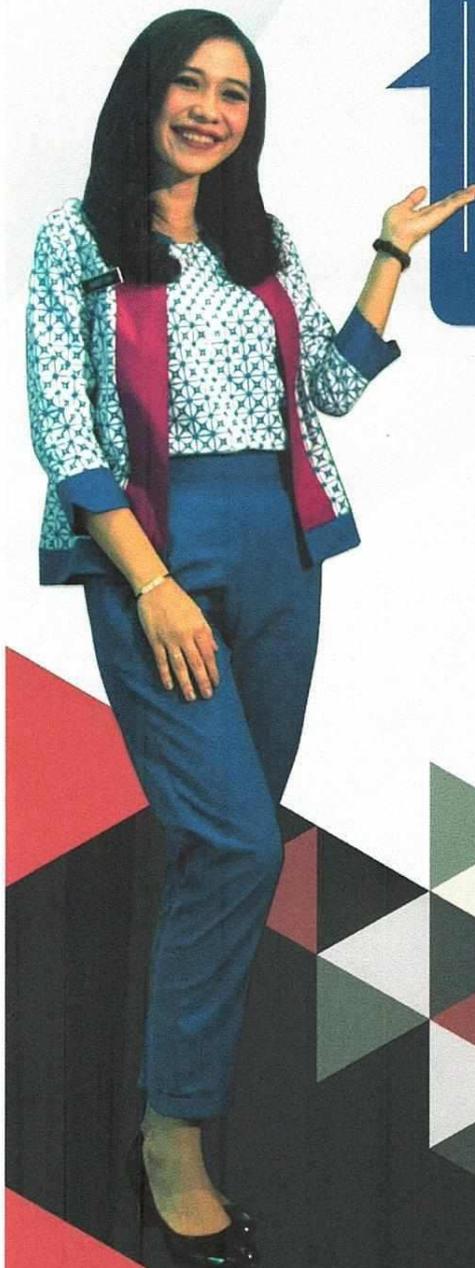
Untuk meningkatkan praktik perantara atau call center, Pemas Provinsi DKI Jakarta membuat layanan AJIB. Layanan ini dinilai efektif untuk meningkatkan praktik perantara atau call center.

#MELAYANIJAKARTA

1500164 @pelayanan.jakarta.go.id #pelayananjakarta @layananjakarta



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA



URUS
IZIN
SENDIRI
ITU
MUDAH

SETIA #MelayaniJakarta

**Gedung Mal Pelayanan Publik
Jl. HR. Rasuna Said Kav C 22**

 1500164

 pelayanan.jakarta.go.id

 /Pelayanan.Jakarta

 @layananjakarta

 @layananjakarta

 /layananjakarta

**LEMBAR PERSETUJUAN
PENELITIAN LAPANGAN
PROGRAM SARJANA TERAPAN POLITEKNIK STIA LAN
JAKARTA**

NAMA : YASOZATULO GEA
NPM : 1832000207
JUDUL : PENGUKURAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2020

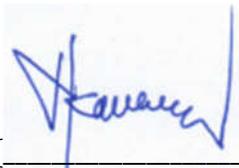
RANCANGAN SKRIPSI DAN INSTRUMEN PENELITIAN DISETUJUI
UNTUK DILAKSANAKAN PENELITIAN

(Dr. R Luki Karunia, SE.Ak, MA)

Nama Pembimbing

(11 Pebruari 2022)

Tanggal



Tanda Tangan

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

PERTANYAAN PENELITIAN

NAMA : YASOZATULO GEA
NPM : 1832000207
PRODI : ABSP
DOSEN PEMBIMBING : **Dr. R Luki Kurnia, SE.Ak, MA**

Pertanyaan wawancara yang akan dilakukan saat penelitian di DPMPTSP :

1. Apakah dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP?
2. Apakah Tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP?
3. Apa sajakah data-data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP?
4. Pedoman apakah yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP?
5. Apakah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP sudah sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014?
6. DALAM Permen PAN RB No 53 Tahun 2014 tidak mensyaratkan adanya Ikhtisar Eksekutif dalam Pembuatan Laporan Kinerja. Mengapa dalam LAKIP DPMPTSP dibuat Ikhtisar Eksekutif?
Jawab: agar pembaca/Pengguna laporan mendapat intisari atau ringkasan informasi dari LAKIP dengan mudah.
7. Dalam Bab III LAKIP DPMPTSP tidak terdapat perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Bagaimana pendapat bapak/Ibu?

Jawab : Target Jangka menengah yang dimaksud adalah target yang terdapat dalam dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang dituangkan dalam perjanjian kinerja tahunan dan telah dituangkan dalam LAKIP DPMPTSP

8. Dalam Perkin Tahun 2020 salah satu Indikator Kinerja Utama adalah Realisasi Investasi sebesar Rp. 110 Triliun. Faktor apa sajakah yang menjadi hambatan sehingga target nilai investasi tidak tercapai?

Jawab: Faktor yang menjadi penghambat itu adalah pandemi COVID-19 yang melanda DKI Jakarta.

9. Dan di bidang mana saja nilai investasi tersebut?

Jawab: Semua bidang/sector terdampak oleh pandemi COVID-19 maka dari itu realisasi investasi juga ikut terdampak.

10. Indeks Kinerja Utama dalam perkin tahun 2020 adalah kepuasan masyarakat sebesar 88,5%. Di bidang pelayanan mana sajakah masyarakat merasa puas dan juga merasa tidak puas?

Jawab: Unsur pelayanan yang dianggap paling memuaskan oleh responden di wilayah DKI Jakarta adalah **Biaya atau Tarif** dengan nilai IKM (91,71 atau A). Unsur Pelayanan yang dianggap paling rendah adalah Sarana dan Prasarana dengan nilai IKM (89,27 atau A)

11. Menurut Men PAN RB No. 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan public yang digunakan adalah angka 1 sampai 4 dengan sebutan nilai kepuasan dimana nilai 1 = tidak baik/puas, 2=kurang baik/puas, 3=baik/puas dan 4=sangat baik/puas. Bagaimana pendapat bapak/ibu?

Jawab: Sudah cukup baik untuk memetakan kepuasan masyarakat pada pelayanan publik

12. Saat melakukan survey kepuasan masyarakat, berapa banyakkah responden?

Jawab: Pada tahun 2020 responden survei kepuasan masyarakat pada DPMPTSP DKI sebanyak 47.558

13. Dalam survey yang dilakukan, berapa persen responden menjawab : Sangat Puas, Puas, tidak Puas dan sangat tidak puas? Pada tahun 2020 Sangat Puas (66,31%), Puas (33,23%), Tidak Puas (0,18%), Sangat Tidak Puas (0,28%)

14. Indeks Kinerja Utama yang ketiga adalah Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online dengan target 100% dan target tersebut bisa tercapai 100%. Apakah yang dimaksud dengan layanan tersebut semua pelayanan di DPMPTSP dilakukan secara online? Jawab: Ya

15. Apakah DPMPTSP sudah tidak melakukan pelayanan secara manual? Atau di kantor? Jawab: Tidak ada, yang ada hanya pelayanan konsultasi yang dilakukan secara manual

16. Adakah target jumlah pelayanan yang dilakukan secara online dari seluruh pelayanan di DMPTSP? Jawab: Tidak Ada

17. Apakah yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan?

18. Indeks pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan tercapai 100%. Apakah maksudnya semua anggaran dapat direalisasikan 100%? Atau semua kegiatan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan 100% atau bagaimana maksudnya?

Nomor : 228/STIA.1.1/PPS.02.3

Jakarta, 14 Februari 2022

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Penelitian Penulisan Skripsi
Mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta

**Yth. Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta**

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama : Yasozatulo Gea
NPM : 1832000207
Jurusan : Administrasi Bisnis
Program Studi : Administrasi Bisnis Sektor Publik
Judul Skripsi : *Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi di Instansi Bapak.

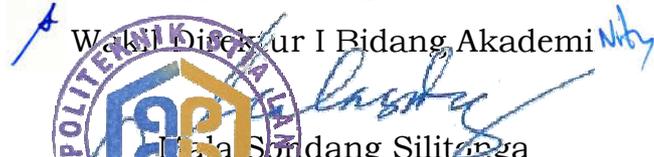
Sehubungan dengan itu kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat membantu mahasiswa kami dimaksud dalam mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkannya.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 14 Febuari 2022

a.n. Direktur

Wakil Direktur I Bidang Akademi


Tita Sondang Silitonga


Tembusan :

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kepala Jurusan Administrasi Bisnis;
3. Kepala Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publik.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN

NOMOR 137 TAHUN 2020

TENTANG

PELAYANAN REKOMENDASI PENELITIAN/SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Sehubungan dengan kegiatan harmonisasi regulasi dan penyesuaian nomenklatur, kewenangan perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya dalam pelayanan Rekomendasi Penelitian/Surat Keterangan Penelitian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, dengan ini diumumkan bahwa :

1. Penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri; dan
 2. Penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- dikecualikan untuk memiliki Rekomendasi Penelitian/ Surat Keterangan Penelitian

Demikian pengumuman ini atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta




Benni Aguscandra
NIP. 196908081997031004

RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. DATA DIRI

Nama : Yasozatulo Gea
Tempat Tanggal Lahir : Nias, 28 Januari 1972
Alamat Domisili : Komplek Perumahan Ciledug Indah 1 Blok A5 No. 106
RT. 005 / RW. 006 Pedurenan Kota Tangerang.
Status Perkawinan : Kawin
Nama Instansi : Sekretariat Pengelola Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari
Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
Alamat Instansi : Komplek Rusunawa Pesakih, Jl. Daan Mogot KM 14,5 Duri
Kosambi Cengkareng Jakarta Barat.
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Pangkat dan Golongan : Pengatur (II/c)
Alamat surel : gyasozatulo@gmail.com
Nomor Telepon : 081389784013

B. DATA PENDIDIKAN

No	Lembaga Pendidikan	Tahun Lulus
1	Politeknik STIA LAN Jakarta	
2	SMA Negeri 1 Gunung Sitoli Kabupaten Nias- Jurusan IPA	1992
3	SMP Swasta Siwalubanua II Kec. Gido Kabupaten Nias	1989
4	SD Inpres Laira Kec. Idanogawo Kabupaten Nias	1986